

# PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT SEBAGAI PENILAI PERILAKU NARAPIDANA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN<sup>1</sup>

Hery Firmansyah

## ABSTRAK

*Penelitian tentang Hakim Pengawas dan Pengamat Sebagai Penilai Perilaku Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Bahan penelitian berasal dari data sekunder maupun data primer. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui praktek pelaksanaan dan penerapan konsep Hakim Pengawas dan Pengamat serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Cara mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi dengan alat studidokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat dilakukan berdasarkan Pasal 277-283 KUHAP, dengan aturan pelaksanaannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 1985 masih mengalami beberapa permasalahan yang memerlukan jalan keluar agar dapat berlaku secara efektif.*

Kata kunci: Hakim Pengawas dan Pengamat, Narapidana, Lembaga Permasyarakatan

## ABSTRACT

*Research on the implementation of judge supervision and observation as the evaluator to Prisoners Behavior in Penitentiary is a normative-empirical legal research. The research data come from secondary data sourced and primary data. The purpose of this study is to examine the practical implementation of judge supervision and observation as the evaluator to Prisoners behavior in Penitentiary and the problems to implement it. The research results show that the implementation of the Supervisory Judge task and Observers in some Penitentiary in Yogyakarta is based on the Criminal Procedure Code Article 277 through Article 283 Criminal Procedure Code, the implementing regulations of the Supreme Court Circular No. RI No. 7 of 1985 still have some problems that need solution in order to be effective.*

Keywords: Judge Supervision and Observation, Prisoners, Penitentiary.

---

<sup>1</sup> Hasil Penelitian Individu Dosen Fakultas Hukum UGM yang mendapatkan dana dari Unit Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum UGM

## A. PENDAHULUAN

Secara umum hukum pidana terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh putusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.<sup>2</sup>

Eksplanasi pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi lainnya. Selain KUHAP menggariskan pembagian kewenangan dan tugas secara institusional, KUHAP sendiri juga mengatur mengenai sistem *check and balance* diantara instansi penegak hukum dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Tahapan perkara pidana atau proses peradilan pidana yang disusun berdasarkan wewenang petugas

hukum meliputi: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, tahap persidangan dan penentuan putusan pengadilan serta tahap pelaksanaan eksekusi putusan hakim.<sup>3</sup>

Setelah semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dilakukan oleh jaksa. Hal tersebut juga ditentukan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Pasal 270 KUHAP mengatur bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang sebelumnya oleh panitera pengadilan negeri yang bersangkutan dikirimkan salinan putusan kepadanya. Penitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada lembaga pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Hakim Pengawas dan Pengamat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) KUHAP yang

<sup>2</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2, dikutip dari Tirta Midjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta; Fasco, hlm.14.

<sup>3</sup> Bambang Purnomo, 1998, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, Amarta, hlm. 2.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta- hlm. 312.



menentukan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di dalam pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidananya terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan para petugas dari Lembaga Perasyarakatan terhadap diri narapidana itu sendiri. Dengan demikian, hakim selain akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian yang bermanfaat bagi pembedanaan.<sup>5</sup>

Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.

Jika memperhatikan fungsi dari tugas

yang dijalankan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (yang dalam tulisan ini akan disingkat menjadi KIMWASMAT) sangatlah baik bagi pembinaan dan penilaian terhadap perilaku narapidana selama mereka menjalani masa pidananya. Namun sangat disayangkan, literatur serta penelitian yang memfokuskan tentang kinerja KIMWASMAT ini masih sedikit jumlahnya. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Hakim Pengawas dan Pengamat Sebagai Penilai Perilaku Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan".

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai penilai perilaku narapidana di Lembaga Perasyarakatan?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ada pada pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai mekanisme penilai perilaku narapidana didalam Lembaga Perasyarakatan ?

## **C. Metode Penelitian**

### **Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian

<sup>5</sup> Suryono Sutarto, 1990, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang, hlm. 10.

hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.<sup>6</sup>

### **Jalannya Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan. *Pertama*, penelitian kepustakaan. Tahap ini dilaksanakan dengan pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan studi dokumen terhadap ketiga macam bahan hukum tersebut untuk mendapatkan gambaran secara garis besar mengenai objek penelitian.

*Kedua*, penelitian lapangan. Tahap ini dimulai dengan penyusunan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan kepada sampel/subyek penelitian. Pedoman wawancara tersebut dikirimkan pada sampel/subyek penelitian dengan disertai permintaan untuk mempelajari serta mempersiapkan data yang dibutuhkan dan permintaan waktu untuk melakukan wawancara, apabila yang bersangkutan bersedia untuk bertatap muka. Apabila sampel atau subyek penelitian tidak bersedia bertatap muka,

maka diminta kesediaannya untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan dan akan diambil oleh peneliti. Pada hari yang telah ditentukan peneliti datang ke tempat subyek penelitian untuk melakukan wawancara dan atau mengambil pedoman wawancara yang telah diisi oleh subyek penelitian.

*Ketiga*, pengolahan dan analisis data serta penyusunan laporan penelitian. Dalam tahap ini data penelitian diolah dan dianalisis yang kemudian dituangkan dalam hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan tersebut disusun dalam bentuk Laporan Penelitian setelah dilakukan proses perbaikan dan penyempurnaan melalui forum seminar hasil penelitian.

### **D. Hasil Penelitian dan pembahasan**

#### **1. Penerapan Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai Mekanisme Penilai Perilaku Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang wilayah hukumnya meliputi daerah kekuasaannya (kompetensi absolut). Memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan tugas pokok hakim yang kesemuanya itu diatur dalam undang-undang. Di samping tugas mengadili, hakim mempunyai tugas lain yaitu untuk

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 52.



melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 277-283 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam sebuah catatan yang dilakukan oleh MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) dalam penelitiannya tentang Lembaga Pengawas Sistem Peradilan (Pidana) Terpadu dikatakan bahwa ternyata hakim pengawas dan pengamat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal KIMWASMAT bertugas dan berfungsi untuk mengawasi dan mengamati apakah putusan yang dikeluarkan sudah dilaksanakan dengan baik oleh jaksa dan apakah putusan tersebut mempunyai manfaat bagi terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan, hal tersebut dapat dilihat didalam rumusan Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Demi keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan, maka di dalam Kitab Undang -undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP), telah diatur tentang keharusan bagi setiap pengadilan untuk menunjuk hakim yang diberikan tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.<sup>7</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 277 ayat (1) KUHAP

yang menentukan bahwa : Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi. Sebagai pelaksana putusan pengadilan atau vonis hakim adalah jaksa sebagai eksekutor.

Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat, dilaporkan kepada ketua pengadilan, yang tidak saja dapat menentukan kebijaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, tetapi juga ada tolak ukur dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Selain itu, untuk mengetahui bahwa pidana yang dikenakan kepada narapidana dapat bermanfaat dan apakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana didasarkan kepada hak-hak asasi narapidana, yang ditujukan demi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana pada umumnya, dan khususnya agar narapidana tidak melakukan kejahatan lagi setelah selesai menjalani masa tahanannya.

Pembinaan terhadap narapidana ditujukan agar mereka mampu memperbaiki

<sup>7</sup> Oemar Sena Adji, 1989, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 86.



diri dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum. Lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina serta mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya model-model pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah

faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.<sup>8</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan KIMWASMAT di beberapa instansi terkait yang peneliti teliti adalah sebagai berikut:

a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Wiragunan DIY

Penerapan KIMWASMAT sebagai mekanisme penilai perilaku narapidana dirasakan kurang efektif sehingga hasil laporan dari KIMWASMAT tidak menjadi bahan pertimbangan karena pengawasan dan pengamatan terhadap perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 2A Wiragunan DIY dilakukan hanya dalam waktu enam (6) bulan atau satu (1) tahun sekali, apabila KIMWASMAT yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Negeri DIY tidak menjalankan tugas dan fungsinya dari pihak Lembaga Pemasyarakatan 2A Wiragunan hanya bisa diam saja dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan fungsi koordinasi Hakim PN sebagai KIMWASMAT dengan Lembaga Pemasyarakatan 2A Wiragunan DIY hanya sebatas pada koordinasi terkait sidang dan putusan-putusan yang pelaksanaannya terlambat.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> C.I. Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hlm. 18 -19.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Heriyanto, selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Wiragunan Yogyakarta pada hari Kamis, 31 Oktober 2013



b. Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan KUHAP dan Buku Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Setiap dua (2) tahun sekali Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan Hakim Pengawas dan Pengamatan. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan dilaksanakan satu (1) tahun dua (2) kali di akhir Juni dan akhir Desember tahun berjalan. Sementara laporan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) di Pengadilan Negeri Yogyakarta di laporkan enam (6) bulan sekali. Bentuk laporan Hakim Pengawasan dan Pengamatan sudah ada formulirnya yang ditentukan.

Fungsi koordinasi dilakukan dengan pihak Kejaksaan sebagai pelaksana (eksekusi) putusan dan dengan Lembaga Pemasyarakatan sebagai penampung Narapidana. Koordinasi Hakim Pengawasan dan Pengamat dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam hal melakukan pengawasan dan pengamatan perilaku narapidana dengan cara di surati terlebih dahulu satu minggu sebelum melakukan kunjungan. Sejak Agustus 2011 pihak Kejaksaan Negeri Yogyakarta belum

mengirim laporan sampai wawancara ini dilaksanakan. Diakui oleh Bahtra Yenny Warita bahwa koordinasi masih kurang sehingga pihak Pengadilan pun belum mengetahui sejauh mana pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh Kejaksaan.<sup>10</sup>

c. Lembaga Pemasyarakatan 2A Narkotika Pakem Yogyakarta

Mekanisme KIMWASMAT sebagai penilai perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Narkotika Pakem Yogyakarta pertama yang diterima dari pihak Lapas adalah surat pemberitahuan Kunjungan KIMWASMAT. Selanjutnya pada saat pelaksanaan pengawasan dan pengamatan KIMWASMAT di Lapas aktifitas yang dilakukan diantara mengambil sampel secara acak, wawancara dengan petugas seputar pelaksanaan putusan, penempatan Narapidana apakah benar Narapidana ada di Lapas sesuai waktu yang di tetapkan dalam putusan Pengadilan, pelaksanaan penjara, rehabilitasi, dan eksekusi yang terlambat. Fungsi koordinasi lintas instansi dalam menjalankan KIMWASMAT sebagai mekanisme penilai perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Narkotika Pakem Yogyakarta dalam hal ini pihak Lapas lebih banyak berkoordinasi dengan Kejaksaan sebagai eksekutor berdasarkan petikan putusan Pengadilan terkait. Kendala yang ditemui

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bahtra Yenny Warita, selaku Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Rabu, 6 November 2013.

yakni konsolidasi dengan pihak Kejaksaan sebagai eksekutor petikan putusan pengadilan misalnya ada kesalahan redaksi dalam petikan putusan ini menjadi kendala tersendiri. Pelaksanaan KIMWASMAT terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan umum ataupun Lembaga Pemasyarakatan khusus tidak ada perbedaan.<sup>11</sup>

## **2. Hambatan-hambatan pada pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai mekanisme penilai perilaku narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan.**

### **a. KEMENKUMHAM DIY**

Pandangan dari pihak Kanwil KEMENKUMHAM DIY melihat fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat Sebagai Penilai Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak efektif. Menurut beliau KIMWASMAT hanya jabatannya yang “menyeramkan”, namun fungsinya tidak berjalan secara maksimal karena pengawasan dan pengamatan hanya dilakukan persemester atau setahun sekali. Selama tiga (3) tahun beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Registrasi Perawatan Khusus Narkotik (Regwatsustik) di Devisi Pemasyarakatan

KEMENKUMHAM DIY fungsi koordinasi antara Kanwil KEMENKUMHAM DIY dengan pihak Pengadilan Negeri DIY dalam menjalankan fungsi KIMWASMAT Sebagai Penilai Perilaku tidak ada, padahal menurut beliau seharusnya koordinasi itu ada. Mungkin koordinasi itu terjadi antara UPT Lapas dengan pihak pengadilan.<sup>12</sup>

Hasil pengawasan dan pemantauan KIMWASMAT tidak bisa digunakan sebagai salah satu parameter penilai perilaku Narapidana karena KIMWASMAT tidak berhadapan langsung dengan Narapidana setiap hari untuk melihat perkembangan dan perubahan perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. KIMWASMAT yang menjalankan tugas dan kewenangan di Lembaga Pemasyarakatan umum dan Lembaga Pemasyarakatan khusus tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya.

### **b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Wirogunan DIY**

Selama ini penilaian perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Wirogunan DIY dilihat dari hubungan atau pergaulan dengan sesama Narapidana, petugas dan kunjungan keluarga. Penilaian perilaku Narapidana itu dilakukan oleh Wali Narapidana. Satu orang Wali Narapidana itu menangani 10-

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Mulyo Adi Guna, selaku staf bimbingan kemasyarakatan dan perawatan (binkemaswat) di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Narkotika Pakem Yogyakarta, pada hari Senin, 4 November 2013.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Iriyanto Kepala Bidang Registrasi Perawatan Khusus Narkotik (Regwatsustik) di Devisi Pemasyarakatan KEMENKUMHAM DIY pada tanggal 25 Oktober 2013.



15 orang Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan 2A Wiragunan DIY. Penilaian perilaku itu digunakan untuk memberikan remisi setelah melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) diantaranya terdiri dari Kasibid Napi, Kepala Subseksi Bimbingan Pemasya-rakatan, Kepala Pengamanan, Kasek Kamtib, Kasek Bimker, Kasubsi registrsi, Kasubsi Keamanan, Kasubsi Pengelola Hasil Kerja, Dokter, Bapas dan KIMWASMAT.<sup>13</sup>

Hasil wawancara dengan narasumber Heriyanto Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Wirogunan DIY pada tanggal 31 Oktober 2013

Hasil laporan dari KIMWASMAT berjalan kurang efektif sehingga tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan karena pengawasan dan pengamatan terhadap perilaku Narapidana di Lembaga Pemsyarakatan 2A Wirogunan DIY dilakukan hanya dalam waktu enam (6) bulan atau satu (1) tahun sekali. Apabila KIMWASMAT yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Negeri DIY tidak menjalankan tugas dan fungsinya dari pihak Lembaga Perasyarakatan 2A Wirogunan hanya bisa diam saja dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan fungsi koordinasi Hakim PN sebagai KIMWASMAT dengan

Lembaga Perasyarakatan 2A Wiragunan DIY hanya sebatas pada koordinasi terkait sidang dan putusan-putusan yang pelaksanaannya terlambat.<sup>14</sup>

Kendala dalam pelaksanaan KIMWASMAT sebagai penilai perilaku Narapidana di Lembaga Perasyarakatan 2A Wirogunan DIY diantaranya adalah koordinasi yang lemah, waktu wawancara yang sangat singkat. Wawancaranya jangan hanya sebatas 2 atau 3 jam saja, sebaiknya diberikan waktu yang diluangkan lebih banyak dan wawancara sebaiknya seminggu 1 atau 2 kali. Tanggungjawab secara moril terhadap tugas dan fungsi pengawasan dan pengamatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 2A Wiragunan DIY. Tidak dapat perbedaan pelaksanaan KIMWASMAT di Lembaga Pemasyarakatan untuk kejahatan umum dengan Lembaga Pemasyarakatan yang dipruntukkan untuk kejahatan khusus (seperti narkoba).<sup>15</sup>

### **c. Pengadilan Negeri Yogyakarta**

Pengadilan Negeri Yogyakarta melaksanakan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) untuk kelancaran tugas Ketua Pengadilan Negeri. KIMWASMAT sebagai perpanjangan tangan Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawas dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan yang

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Heriyanto Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Wiragunan DIY pada tanggal 31 Oktober 2013.

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid



menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Mengingat Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan KUHAP dan Buku Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Setiap dua (2) tahun sekali Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan Hakim Pengawas dan Pengamatan. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan dilaksanakan satu (1) tahun dua (2) kali di akhir Juni dan akhir Desember tahun berjalan. Sementara laporan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) di Pengadilan Negeri Yogyakarta di laporkan enam (6) bulan sekali. Bentuk laporan Hakim Pengawasan dan Pengamatan sudah ada formulirnya yang ditentukan.<sup>16</sup>

Fungsi koordinasi dilakukan dengan pihak Kejaksaan sebagai pelaksana (eksekusi) putusan dan dengan Lembaga Pemasyarakatan sebagai penampung Narapidana. Koordinasi Hakim Pengawasan dan Pengamat dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam hal melakukan pengawasan dan pengamatan perilaku narapidana dengan cara di surati terlebih dahulu dengan tenggang waktu yang

diberikan selama 1 (satu) minggu sebelum melakukan kunjungan. Sejak Agustus 2011 pihak Kejaksaan Negeri Yogyakarta belum mengirim laporan sampai wawancara ini dilaksanakan. Diakui oleh Ibu Bahtra Yenny Warita bahwa koordinasi masih kurang sehingga pihak Pengadilan pun belum mengetahui sejauh mana pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh Kejaksaan.<sup>17</sup>

Menurut peneliti pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya, akan tetapi terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) seperti menyesuaikan waktu atau jadwal kunjungan pengawasan dan pengamatan dikarenakan tugas utama dari seorang Hakim adalah sidang, sementara pengawasan dan pengamatan adalah merupakan tugas tambahan yang ditetapkan melalui penetapan Ketua Pengadilan.

Hakim Pengawas dan Pengamat yang telah di tetapkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan jika tidak menjalankan tugas dan fungsi KIMWASMAT di Pengadilan Negeri Yogyakarta selama ini tidak diberikan sanksi, tetapi melainkan diganti dengan KIMWASMAT yang baru. Adapun mekanisme sanksi yang diberikan berupa teguran secara lisan sekali, kemudian Ketua Pengadilan mempertanyakan kepada

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Bahtra Yenny Warita yang sudah disarikan, beliau adalah Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 November 2013 bertempat di ruang Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Mulyo Adi Guna sebagai staf bimbingan kemasyarakatan dan perawatan (binkemaswat) di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Narkotika Pakem Yogyakarta pada 24 November 2013.



KIMWASMAT yang bersangkutan alasan kenapa Hakim bersangkutan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai KIMWASMAT, jika alasannya tidak tepat maka langkah selanjutnya yang diambil adalah KIMWASMAT tersebut akan diganti dengan KIMWASMAT yang baru.

Langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memaksimalkan peran KIMWASMAT sebagai Mekanisme Penilai Narapidana di LAPAS mengacu pada ketentuan yang mendasari fungsi dan tugas dari KIMWASMAT yakni KUHAP dan Buku Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Penetapan KIMWASMAT sudah berjalan, kemudian KIMWASMAT tersebut harus mutasi tugas, maka Ketua PN Yogyakarta menetapkan SK baru untuk membantu Ketua dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan, apabila KIMWASMAT yang mutasi tersebut telah melakukan pengawasan dan pengamatan maka, KIMWASMAT yang baru melanjutkan tugas dan fungsi KIMWASMAT sebelumnya yang pasti sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

#### **d. Lembaga Perasyarakatan 2A Narkotika Pakem Yogyakarta**

Penilaian perilaku Narapidana di Lembaga Perasyarakatan dilakukan oleh Wali Perasyarakatan yang memberikan pendampingan dan pembimbingan terhadap

Narapidana. Wali perasyarakatan biasanya mendampingi atau membimbing lima belas (15) orang Narapidana. Peningkatan pembimbingan dibagi dalam tiga (3) tahap :<sup>18</sup>

1. Tahap awal yakni 0 sampai 1/3 masa pidana.
2. Lanjutan awal yakni 1/3 sampai 1/2 masa pidana.
3. Pembina akhir 2/3 sampai bebas murni. 0 sampai 1/3 masa pidana untuk masa pengenalan lingkungan (mapenaling) dan pembinaan kerohanian. Masih masa pidana 0-1/3 dilakukan pembinaan kemandirian seperti tukang, salon, perikanan, sablon, pertanian dan jahit menjahit. Masa pidana 1/2 sampai 2/3 akan dilakukan asimilasi. Masa Pidana 2/3 sampai akhir dilakukan reintegrasi diantaranya pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Penilai perilaku Narapidana dilakukan untuk keperluan remisi tentu diberikan kepada Narapidana yang berperan aktif dalam kegiatan, berkelakuan baik sesama napi, petugas maupun pada saat kunjungan keluarga. Wali perasyarakatan dalam melakukan pendampingan dan pembimbingan senantiasa disertai dengan kartu pembinaan dan laporan perkembangan perilaku Narapidana.

Mekanisme KIMWASMAT sebagai

<sup>18</sup> Ibid

penilai perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Narkotika Pakem Yogyakarta pertama yang diterima dari pihak Lapas adalah surat pemberitahuan Kunjungan KIMWASMAT. Selanjutnya pada saat pelaksanaan pengawasan dan pengamatan KIMWASMAT di Lapas aktifitas yang dilakukan antara mengambil sampel secara acak, wawancara dengan petugas seputar pelaksanaan putusan, penempatan Narapidana apakah benar Narapidana ada di Lapas sesuai waktu yang di tetapkan dalam putusan Pengadilan, pelaksanaan penjara, rehabilitasi, dan eksekusi yang terlambat.

Sampai saat ini di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Narkotika Pakem Yogyakarta belum ada temuan dari pelaksanaan KIMWASMAT, jikalau ada temuan akan menjadi bahan pertimbangan pengurangan hukuman. Hal yang menarik untuk dikritisi adalah apabila KIMWASMAT yang telah ditunjuk oleh Pengadilan terkait tidak menjalankan tugas dan fungsinya di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di kelas 2A Narkotika Pakem Yogyakarta, maka tidak dapat dilakukan tindakan pemberian sanksi atau bahkan pendekatan secara administrasi (teguran ataupun penundaan kenaikan pangkat).

Fungsi koordinasi lintas instansi dalam

menjalankan KIMWASMAT sebagai mekanisme penilai perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Narkotika Pakem Yogyakarta dalam hal ini pihak Lapas lebih banyak berkoordinasi dengan Kejaksaan sebagai eksekutor berdasarkan petikan putusan Pengadilan terkait. Adapun kendala yang ditemui yakni konsolidasi dengan pihak Kejaksaan sebagai eksekutor, petikan putusan pengadilan misalnya ada kesalahan redaksi dalam petikan putusan ini. Tidak terdapat perbedaan Pelaksanaan KIMWASMAT terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan umum ataupun Lembaga Pemasyarakatan khusus.

Dalam penelitian ini juga ditemukan kelemahan mendasar dalam hal koordinasi antar lembaga terkait pelaksanaan KIMWASMAT, seperti yang diuraikan dibawah ini:

1) Kanwil KEMENKUMHAM DIY

Sementara fungsi koordinasi antara Kanwil Kemenkumham DIY dengan pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjalankan fungsi KIMWASMAT Sebagai Penilai Perilaku tidak ada.<sup>19</sup>

2) Lembaga Pemasyarakatan Klas 2A Wirogunan DIY

Kendala dalam pelaksanaan

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan bapak S Heru Iriyanto, selaku Kepala Bidang Registrasi Perawatan Khusus Narkotik (Regwatsustik) di Devisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 25 Oktober 2013.



KIMWASMAT sebagai penilai perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 2A Wirogunan DIY diantaranya adalah koordinasi yang lemah, waktu wawancara yang sangat singkat kepada narapidana. Wawancaranya seharusnya tidak dalam waktu yang singkat yaitu 2 atau 3 jam saja, sebaiknya diberikan waktu yang diluankan lebih banyak dan wawancara sebaiknya seminggu 1 atau 2 kali sebagai tanggungjawab secara moril terhadap tugas dan fungsi pengawasan dan pengamatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 2A Wiragunan DIY.<sup>20</sup>

3) Pengadilan Negeri Yogyakarta

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) adalah menyesuaikan waktu atau jadwal kunjungan pengawasan dan pengamatan dikarenakan tugas utama dari seorang Hakim adalah sidang, sementara pengawasan dan pengamatan adalah merupakan tugas tambahan yang ditetapkan melalui penetapan Ketua Pengadilan.<sup>21</sup>

4) Lembaga Pemasyarakatan 2A Narkotika Pakem Yogyakarta

Kendala yang ditemui yakni

konsolidasi dengan pihak Kejaksaan sebagai eksekutor didalam hal petikan putusan pengadilan. Titik penting dalam proses ini adalah melihat kerja jaksa yang diibaratkan hanya menjadi "petugas pos" yang hanya menyampaikan surat namun tidak melakukan kegiatan yang lebih jauh dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, misalnya dengan melakukan pemantauan ke LAPAS tempat narapidana yang bersangkutan.

Secara keseluruhan dapat ditambahkan pula dalam penelitian ini permasalahan pelaksanaan KIMWASMAT juga terjadi dikarenakan pendanaan yang minim bahkan tidak ada anggaran khusus untuk pelaksanaan KIMWASMAT dari DIPA (Daftar Isian Pembiayaan Anggaran) KEMENKUMHAM. Hal ini tentu menjadi masalah dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan KIMWASMAT yang baik, misalnya saja di Yogyakarta belum didirikan LAPAS anak, sehingga terkadang masih ditemukan narapidana, anak tinggal satu blok dengan narapidana dewasa. Selain itu tugas dan fungsi hakim yang sudah banyak dengan menangani perkara di pengadilan menjadi tambah berat dengan adanya pelaksanaan KIMWASMAT, beban kerja yang tidak berbanding lurus dengan sumber daya

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan bapak Heriyanto, selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Klas 2 A Wiragunan Yogyakarta, pada hari Jumat, 25 Oktober 2013.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Bahtra Yenny Warita, selaku Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 November 2013 bertempat di ruang Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

manusia yang tersedia merupakan kendala lain yang menjadikan tidak optimalnya operasional KIMWASMAT. Pada bagian penutup penelitian ini, peneliti ingin mengatakan bahwa penerapan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) Sebagai Penilai Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak efektif. Sementara fungsi koordinasi antara Kanwil KEMENKUMHAM DIY dengan pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjalankan fungsi KIMWASMAT Sebagai Penilai Perilaku tidak ditemukan atau tidak ada.<sup>22</sup>

## **E. Kesimpulan dan Saran**

### **E.1 Kesimpulan**

1. Penerapan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) Sebagai Penilai Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan secara umum dapat dikatakan tidak efektif. Hal ini secara ringkas dapat dilihat dari pelaksanaan KIMWASMAT dari beberapa institusi terkait didalam penelitian ini, seperti:

a. Kanwil KEMENKUMHAM  
DIY

Lemahnya fungsi koordinasi antara Kanwil KEMENKUMHAM DIY dengan pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjalankan fungsi KIM-

WASMAT Sebagai Penilai Perilaku bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada sama sekali tindakan yang mengoptimalkan peran tersebut.

b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Wirogunan DIY

Penerapan KIMWASMAT sebagai mekanisme penilai perilaku narapidana dirasakan kurang efektif sehingga hasil laporan dari KIMWASMAT tidak menjadi bahan pertimbangan karena pengawasan dan pengamatan terhadap perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 2A Wiragunan DIY dilakukan hanya dalam waktu enam (6) bulan atau satu (1) tahun sekali.

c. Pengadilan Negeri Yogyakarta  
KIMWASMAT disini hanya menjalankan tugas dan fungsinya secara formalitas saja seperti apa yang diamanatkan didalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT). Dalam waktu

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan S Heru Iriyanto, selaku Kepala Bidang Registrasi Perawatan Khusus Narkotik (Regwatsustik) di Devisi Pemasyarakatan Kemententerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Jumat, 25 Oktober 2013



tiap dua (2) tahun sekali Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan Hakim Pengawas dan Pengamatan. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan dilaksanakan satu (1) tahun dua (2) kali di akhir Juni dan akhir Desember tahun berjalan. Namun kunjungan KIMWASMAT ke LP, jika diperhatikan sangat kurang sehingga sangat tidak mungkin memberikan penilaian yang tepat terhadap perbaikan perilaku narapidana di LP.

- d. Lembaga Pemasyarakatan 2A Narkotika Pakem Yogyakarta
- Mekanisme KIMWASMAT sebagai penilai perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Narkotika Pakem Yogyakarta pertama yang diterima dari pihak Lapas adalah surat pemberitahuan kunjungan KIMWASMAT. Selanjutnya pada saat pelaksanaan pengawasan dan pengamatan KIMWASMAT di Lapas aktifitas yang dilakukan diantaranya adalah mengambil sampel secara acak, wawancara dengan petugas seputar pelaksanaan putusan, penempatan Narapidana apakah benar. Narapidana ada di Lapas

sesuai waktu yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan, pelaksanaan penjara, rehabilitasi, dan eksekusi yang terlambat.

2. Masih banyak kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan KIMWASMAT dilapangan seperti tidak adanya mekanisme sanksi bagi KIMWASMAT yang tidak menjalankan tugasnya. Beban kerja yang sudah berat bagi para hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara menjadi semakin berat dengan adanya tugas KIMWASMAT (beban kerja yang tidak linier dengan jumlah personil hakim yang ada). Selain itu masalah utama dalam hal ini adalah lemahnya fungsi koordinasi dan konsolidasi antar instansi terkait (Kejaksaan, Pengadilan, LP dan Kanwil KEMENKUMHAM) dalam menemukan formula terbaik bagi optimalnya pelaksanaan KIMWASMAT, sehingga dapat digunakan menjadi salah satu mekanisme penilai perilaku narapidana dalam LP.

## **E.2 Saran**

1. KIMWASMAT seharusnya dapat melakukan pengawasan dan pengamatan secara rutin

dengan jadwal kunjungan yang sudah di jadwalkan secara periodik.

2. Sebaiknya penunjukkan KIMWASMAT yang di tunjuk adalah Hakim senior sehingga Hakim tersebut lebih berpengalaman dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai KIMWASMAT di Lembaga Pemasyarakatan.

(RNB - PS)

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1998, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta.
- C.I. Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Keosriani Siswosoebroto, 2009, *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1989, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Ranjit Kumar, 1999, *Research Methodology: A Step-by-step Guide for Beginners*. Melbourne: Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited.

S. Arikunto, 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi revisi II. Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan kedua. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Suryono Sutarto, 1990, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dinyatakan berlaku dengan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 158).

PP No 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.